

**BAHAN AJAR  
NASIONALISME**

**Oleh :  
EKO YULIAN, S.Si, M.Stat**

**LATSAR CPNS BPS GOLONGAN III ANGKATAN 26  
TAHUN 2019**



## DAFTAR ISI

1. Nasionalisme di Barat (Sebelum Perang Dunia II).....	1
2. Nasionalisme Timur (Abad XX) .....	5
3. Konsep Kebijakan Publik .....	12
1. Pengertian Kebijakan.....	12
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	16
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan .....	18
5. Kerangka Kerja Kebijakan Publik .....	19
6. Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	20



Sebagai suatu fenomena, nasionalisme terjadi dimana-mana yang meliputi benua Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi dan ikut mewarnai tumbuhnya nasionalisme yang kemudian menjadi spirit bagi bangsa untuk mencapai harapan-harapan barunya seperti kemerdekaan, persamaan dan kemandirian untuk menentukan kehidupan melalui negara nasionalnya. Berturut-turut di bawah ini akan dikemukakan perkembangan nasionalisme di berbagai belahan dunia .

## **1. Nasionalisme di Barat (Sebelum Perang Dunia II)**

Nasionalisme sebagai ide, baru muncul antara tahun 1776 hingga 1830 khususnya di benua Eropa dan Amerika ketika terjadi proses integrasi dari kerajaan-kerajaan sampai terbentuknya negara nasional. Dalam proses transisi itu lahir apa yang disebut masyarakat kelas menengah. Perkembangan nasionalisme di Barat khususnya di Eropa berjalan melalui tiga fase demikian: *pertama*, bermula pada saat hancurnya kerajaan yang dimulai pada zaman akhir abad pertengahan dan mulai berdirinya negara-negara nasional dengan ciri pokok dalam fase ini ialah identifikasi bangsa dalam perorangan yang berkuasa. Tahap pertama ini memiliki karakteristik yang mendasar dalam diri perorangan yang berkuasa sebagaimana dikemukakan oleh Carr demikian: *“The essential characteristic of the periode was the identification of the nation with the periode was the identification of the nation with the person of the sovereign*

Fase kedua dari perkembangan nasionalisme di Eropa bermula sejak kekacauan perang Napoleon dan berakhir dalam tahun 1914. Menurut pendapat Carr peletak dasar dari nasionalisme modern yang dalam sejarah mulai dijumpai modelnya pada abad ke 19, yaitu Jean Jacques Rousseau (1712-1778), yang menolak penjelmaan bangsa pada seorang penguasa atau kelas yang berkuasa dan yang secara berani mengidentifikasikan bangsa dengan rakyat (*volk*) atau *people*. Penetapan Rousseau ini kemudian berkembang menjadi suatu prinsip fundamental bagi revolusi Perancis. Di dalam fase ini ciri pokok bukan lagi tercermin pada perilaku seorang raja melainkan identitasnya tercermin pada perilaku dari golongan masyarakat tertentu yang sedang berperan besar saat itu, sehingga nasionalisme pada fase ini sering disebut sebagai *“the middle class nationalism”*.

Fase ketiga, perkembangan nasionalisme di Eropa merupakan ungkapan dari tuntutan massa untuk ikut berperan sedemikian rupa hingga nasionalisme taraf ketiga ini dapat disebut

sebagai "sosialisasi dari pada bangsa". Ungkapan kepentingan dan perasaan massa ini tercermin di setiap kebijaksanaan politik dan ekonomi bangsa yang bersangkutan dengan dorongan massa, sehingga mensyaratkan adanya loyalitas dari massa tersebut. Corak dalam fase ini melebih-lebihkan kepentingan bangsa sendiri, melampaui batas sehingga mudah menjelma menjadi suatu nasionalisme sempit dan congkak yang berkeinginan untuk mengadakan adu kekuatan dengan bangsa lain .

### **Amerika (1776)**

Bangsa Amerika nasionalismenya didorong oleh semangat kebebasan dan persamaan yang menghasilkan negara nasional yang pertama (1776). Negara nasional merupakan fenomena baru setelah negara kerajaan yaitu model negara yang dihasilkan melalui gerakan nasionalisme. Gerakan di Amerika melawan sistim kekuasaan yang menindas dan diskriminatif termasuk pada jaman gerakan yang dipimpin Marten Luter King yang menyuarakan kebebasan dari kekuasaan dan sistim yang diskriminatif (pembedaan berdasar warna kulit). Oleh karena itu Amerika terkenal dengan *the four freedomnya* dan patung *liberte* (dewi kemerdekaan), sebagai patung yang mengingatkan bahwa kemerdekaan merupakan hak dasar manusia. John Locke terkenal dengan prinsip dasar tersebut yang kemudian dalam perkembangannya prinsip kemerdekaan tersebut tidak dapat dilepaskan dengan keyakinan mengenai persamaan manusia yang selanjutnya menjadi dasar bagi sistim demokrasi.

### **Perancis (1789)**

Bangsa Perancis nasionalismenya tidak dapat dilepaskan dengan revolusi Perancis yaitu perubahan sistim kekuasaan melalui revolusi besar yang sangat terkenal. Untuk melakukan perubahan di Perancis maka terjadilah revolusi yang menumbangkan sistim kerajaan diganti dengan sistim demokrasi (kedaulatan rakyat). Gerakan nasionalisme di Perancis tidak hanya melahirkan negara nasional baru tetapi juga sistem kekuasaan yang baru dan modern yaitu demokrasi Barat. Roh revolusi Perancis yang sangat terkenal yaitu *leberte* (kemerdekaan), *egalite* (persamaan) dan *fraternite* (persaudaraan).

### **Jerman (1776-1830)**

Nasionalisme Jerman menunjukkan gejala yang sangat berbeda dengan nasionalisme Amerika dan Perancis, karena nasionalisme bangsa Jerman khususnya ketika bangsa Jerman dipimpin Hitler corak nasionalismenya menjadi *chauvinistis*. *Chauvinistis* adalah sikap

kebangsaan yang sempit dan sombong (congkak) dengan semboyan *German Uber Alles* atau Jerman sebagai bangsa yang paling unggul dan terhormat didunia karena berasal dari ras Aria.

Nasionalisme Jerman yang bercorak *chauvinistik* dengan tokohnya Hitler ternyata menjadi pemicu Perang Dunia kedua. Nasionalisme yang demikian itu mendasarkan pada faham rasintik (yang menganggap bahwa hanya rasnya sendirilah yang sangat hebat dan unggul di dunia). Faham rasintik pada jaman Hitler itu terbukti membahayakan dalam hubungan antar bangsa karena menimbulkan sikap yang congkak/sombong serta mengagungkan bangsanya sendiri. Pada tahun 1930-an nasionalisme Jerman diwarnai oleh nasionalisme "Nazi" yaitu berdasarkan rasialisme.

Antara nasionalisme di Amerika dan Perancis ada kesamaan yang kuat dibanding dengan nasionalisme Jerman. Nasionalisme bangsa Amerika dan bangsa Perancis dalam revolusinya tidak didorong oleh semangat ras atau anti terhadap ras tertentu tetapi di Amerika justru melawan rasialisme yang menempatkan kulit hitam sebagai kelas dua reformasi oleh Marten Lhuter King. Kebebasan dan persamaan serta persaudaraan justru menjadi roh yang kuat mendasari semangat kesatuan bangsa. Hal itu tentu mengatasi ras dan golongan atau faham primordialisme / etnisitas seperti agama, bahasa, keturunan dan sebagainya. Begitu juga di Perancis semangat nasionalismenya tidak didasarkan oleh semangat ras tertentu melainkan dorongan agar ada solideritas meluas yang didasarkan pada kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Nasionalisme bangsa Perancis berkaitan dengan keinginan untuk perubahan sistim dari yang lama (monarkhi/kerajaan) menuju demokrasi. Peletak dasar sistim yang baru di Barat itu ialah pemikiran Jean Jeques Rousseau, John Locke dan Montesque.

### **Italia (1776-1830)**

Pada jaman Mussolini berkuasa, diajarkan bahwa bangsa Italia berasal dari ras *italiana* yaitu sebagai bangsa yang unggul dan memiliki watak yang berdasarkan keturunan bangsa italiana. Nasionalisme Italia bercorak fasis yaitu adanya unsur rasistik dan semangat mengagung-agungkan bangsanya sendiri. Hampir sama dengan semangat nasionalisme yang terjadi di Jerman pada masa Hitler yang mengajarkan bahwa ras Aria merupakan keturunan bangsa Jerman. Bangsa Jerman mempunyai kewajiban yang dianggap suci untuk memimpin dan menguasai dunia.

Secara umum nasionalisme Barat (khususnya Perancis) dan Amerika didasarkan atas keinginan untuk menggapai kebebasan dalam kehidupan bangsa dimana kebebasan itu harus ditegakkan dan dijamin oleh negara nasional supaya dihayati dalam kehidupan konkrit. Kebebasan di Barat lebih didasarkan pada semangat individualisme yang kemudian mewarnai kehidupan politik, sosial, ekonomi. Demokrasi liberal misalnya, tidak lain merupakan semangat kebebasan individual yang teraktualisasi di bidang politik. Khusus di Jerman dan Italia nasionalisme diwarnai oleh semangat mengagungkan bangsa sendiri (ras). Semangat kebebasan individual (liberalisme) yang menyertai nasionalisme di Barat akhirnya berkembang bersamaan dengan munculnya kapitalisme yang agresif dan eksploitatif serta industrialisasi sehingga menjadi ekspansif. Kapitalisme merupakan semangat kebebasan individual yang teraktualisasi di bidang ekonomi.



Nasionalisme Barat yang teraktualisasi dalam bentuk kebebasan yang harapannya juga terjadi persamaan dan persaudaraan ternyata berkembang menjadi nasionalisme yang ekspansif karena kebebasan lebih dihayati di bidang politik saja sedangkan di bidang ekonomi dan sosial tidak terjadi persamaan dan persaudaraan sehingga nasionalisme ekspansif ini menimbulkan kapitalisme dunia yang eksploitatif, kolonialisme dan imperialisme di Asia. Banyak kritikan terhadap situasi pasca revolusi Perancis karena kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan hanya terjadi di bidang politik sedangkan di bidang ekonomi dan sosial tidak terwujud sehingga menimbulkan kesenjangan.

### **Bangsa Eropa dengan Corak Nasionalismenya**

<b>NO</b>	<b>Bangsa</b>	<b>Timbulnya Nasionalisme</b>	<b>Corak Nasionalisme</b>
1	Amerika	Kekuasaan dan sistim yang tidak adil /diskriminatif	Kemanusiaan dan keadilan: liberte, egalite yang kemudian bersifat ekspansif sebagai hasil pertumbuhan dari imperialisme finansial dan ekonomi
2	Perancis	Sistim kekuasaan yang tidak adil/ yang dirasakan menindas	Kemanusiaan dan keadilan: liberte, egalite dan fraternite , berkembang menjadi nasionalisme borjuis.
3	Jerman	Dorongan untuk mendominasi/memperluas wilayah, pemimpin yang absolut (ubermans) dengan memanfaatkan teori geopolitik sebagai landasan pembenaran untuk ekspansi	Rasintik (chauvinistik), mengagungkan bangsa sendiri Nasionalisme-sosialisme Nasionalismenya lebih ekspansif
4	Italia	Dorongan Pemimpin yang fasis	Fasisme, rasintik (ras italiana)

Nasionalisme Barat yang semula terkenal mendambakan kemerdekaan, persamaan dan solideritas dalam perkembangannya menjadi nasionalisme yang ekspansif dalam wajah kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme yang kemudian menjajah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan penghayatan tentang kebebasan yang lebih diletakkan pada semangat individualisme. Ada masanya dimana bangsa yang kuat berlomba-lomba untuk menguasai dunia sehingga munculah cita-cita membentuk kawasan seperti *Pan Americana*, *Pan Jermania*, *Pan Asia* dsb.

## **2. Nasionalisme Timur (Abad XX)**

Nasionalisme di dunia Timur termasuk di dalamnya Asia Tenggara dan Indonesia biasanya menggunakan istilah kebangkitan nasional. Berbeda dengan Barat, nasionalisme di Timur bangkit karena reaksi dari kolonialisme dan imperialisme. Pada umumnya kebangkitannya disertai dengan sikap anti kolonialisme dan imperialisme. Nasionalisme di dunia Timur merupakan fenomena abad XX.

## Jepang

Bangsa Jepang, sebelum Perang Dunia II menyatakan bahwa bangsa Jepang adalah keturunan Dewa-Dewa. Tenno atau kaisar Jepang adalah keturunan dewa matahari yang menguasai seluruh alam. Nasionalisme bangsa Jepang diwarnai oleh semangat berdasarkan dewa matahari maka loyalitas kepada kaisar Jepang sangat kuat. Pernah beberapa istilah terkenal seperti semangat *jibakutai*, *kamikaze*. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya menguasai Asia, terlihat ada unsur mengagungkan ras dan ada semangat ekspansif serta fasisme. Jepang mirip seperti Jerman dalam sepak terjangnya untuk menguasai wilayah dan membentuk Pan Asia. Pernah semboyan *nipon Pemimpin Asia*, *nipon pelindung Asia* dan *nipon cahaya Asia* sebagai semboyan yang sangat terkenal yang menunjukkan obsesinya untuk menguasai dan sekaligus menyingkirkan bangsa Eropa (penjajah) dari Asia.

## Vietnam

Bangsa Vietnam sebelum Perang Dunia II menghadapi kolonialisme Perancis dan pendudukan militer Jepang sehingga nasionalisme Vietnam berwatak militan. Sifat militan semakin radikal dan berkembang dibawah pengaruh komunis.

### Vietnam

N0	Bangsa	Kondisi yang dihadapi	Corak nasionalismenya
1	Nasionalisme Vietnam	Menghadapi koloni Perancis dan pendudukan Jepang	Nasionalisme bercorak komunisme karena berbagai pengaruh Komunisme dunia dan reaksi terhadap Barat

## Birma

Birma yang sekarang dikenal dengan Myanmar menghadapi penjajahan Barat dan militer Jepang sehingga corak nasionalismenya anti kolonialisme dan kapitalisme namun diwarnai sosialisme dengan filsafat egalitarian dari budha yang bersifat mempersatukan.

### Birma

N0	Bangsa	Kondisi yang dihadapi	Corak nasionalismenya
2	Nasionalisme Birma (Myanmar)	Menghadapi Penjajahan Barat dan pendudukan militer Jepang	Semangat anti imperialis/ anti kapitalis yang hebat dan diwarnai oleh sosialisme dan diwarnai oleh filsafat egalitarian dari Budha yang mempersatukan

## Malaysia

Menghadapi kolonialisme Inggris namun nasionalismenya bercorak moderat, lahir dari masyarakat yang multi rasial dan campuran antara budaya melayu, Islam dan Inggris.

Nasionalisme Malaysia modern mempunyai dua pusat yang saling mendukung. Pertama nasionalisme kaum terpelajar yang berpusat pada organisasi UMNO dan nasionalisme bangsawan yang berpusat di Sembilan kesultanan. (Abdulgani:1995:10). Kaum nasionalis terpelajar UMNO memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif sedangkan Sultan

(kasultanan) memegang posisi simbolis untuk memimpin berdasarkan sejarah keturunan yang berdasarkan tradisi.

### Malaysia

N0	Bangsa	Kondisi yang dihadapi	Corak nasionalismenya
3	Nasionalisme Malaysia	Menghadapi kolonialisme Inggris	Berciri moderat, lahir dari masyarakat yang multi rasial Campuran antara budaya melayu, Islam dan Inggris

### Filipina

Nasionalisme Filipina merupakan campuran dari kebudayaan Melayu, Spanyol dan Amerika. Kolonialisme Amerika, sesudah Spanyol di Filipina memiliki ciri khas yang sama sekali berbeda. Kemerdekaan Filipina 1934 dilihat sebagai hasil kompromi.

### Filipina

N0	Bangsa	Kondisi yang dihadapi	Corak nasionalismenya
4	Nasionalisme Filipina	Menghadapi Spanyol dan kolonialisme Amerika	Nasionalisme Filipina merupakan campuran Melayu, Spanyol dan Amerika

### Singapura

Nasionalisme Singapura diwarnai oleh multi rasial dan multi lingual yang didominasi oleh keturunan Tionghoa dan sebagian India, Melayu dengan corak nasionalisme yang bersifat pragmatis non ideologis.

### Singapura

N0	Bangsa	Kondisi yang dihadapi	Corak nasionalismenya
5	Nasionalisme Singapura	Hampir sama dengan Malaysia	Nasionalisme yang diwarnai multi rasial dan multilingual yang didominasi oleh keturunan Cina sebagian keturunan India dan Melayu membentuk bangsa Singapura. Nilai nasionalisme dikaitkan dengan pragmatism non-ideologis.

### Thailand

Bangsa Thailand tidak pernah mengalami penjajahan Barat sehingga nasionalisme Thailand lebih dihadapkan pada sifat feodalis kerajaan sehingga nasionalismenya sebagai reaksi atas ketidakadilan untuk merombak sifat feodalis kerajaan menuju monarkhi parlementer. Dari corak nasionalismenya bukan tipe nasionalisme anti kolonialisme dan anti imperialism.

## Thailand

N0	Bangsa	Kondisi yang dihadapi	Corak nasionalismenya
6	Nasionalisme Thailand	Menghadapi sifat feodalis (kerajaan)	Tidak ditemukan nasionalisme dalam arti sentimen anti kolonialisme dan imperialisme karena tidak pernah mengalami penjajahan.  Nasionalismenya sebagai gerakan demokratis untuk merombak sifat feodalis kerajaan menuju suatu monarkhi parlementer.

## Tiongkok (Cina)

Tiongkok sebelum Sun Yat Zen nasionalisme menunjukkan identik dengan kosmopolitanisme. Ini berarti nasionalismenya belum memiliki identitas yang jelas karena identik dengan kosmopolitanisme yaitu dalam bentuk komunisme dunia. Namun sesudah Sun Yat Zen menunjukkan perbedaan karena terlihat di dalam konsep San MinChu I (Mintsu, Minchuan, Min sheng).

Posisi nasionalisme pada era ini memperlihatkan perbedaannya dibanding sebelum Sun Yat Zen sebagaimana terlihat pada skema di awah ini. Sun MinChu I yang mencakup Mintsu: nasionalisme, MinChuan: demokrasi, Min Sheng (sosialisme) jelas-jelas menempatkan nasionalisme sebagai salah satu dari tiga prinsip. Nasionalisme diakui sebagai prinsip penting dalam ajarannya berdampingan dengan demokrasi dan sosialisme sebagai prinsip yang sama-sama penting dalam kehidupan bangsa.

## India

Nasionalisme India sangat dipengaruhi oleh pemimpin kharismatik terkenal yaitu Gandhi. Gandi pernah mengatakan bahwa "*my nationalism is humanity*" atau "saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan". Pengaruh agama di India yaitu hinduisme dan budhisme sangat kuat dan dominan, bahkan pengaruh hindu dan budhisme di kawasan Asia Tenggara juga cukup besar.

## Indonesia

Secara garis besar nasionalisme Indonesia mengalami proses dan tahap-tahap dimulai dari perjuangan Kartini yang mnghendaki *emansipasi* menghadapi tradisi yang dianggap menghambat kaum perempuan. Walaupun Kartini sering dikategorikan sebagai pejuang wanita, tetapi ditinjau dari teori yang ada seperti teorinya Sartono Kartodirdjo (1967) sepak terjang Kartini masuk pada fase paling awal pembentukan nasionalisme Indonesia. Tahap

selanjutnya adalah terbentuknya organisasi-organisasi kebangsaan yang menandai bangkitnya kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Perkembangan selanjutnya ialah komitmen sebagai bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Nasionalisme Indonesia dapat dibuat tiga kategori yaitu nasionalisme pra kemerdekaan dan nasionalisme setelah proklamasi kemerdekaan serta nasionalisme setelah reformasi. Setiap keadaan tentu menjadikan nasionalisme menghadapi masalah yang berbeda. Pada masa pra kemerdekaan misalnya, masalah yang dihadapi bangsa yaitu bagaimana mewujudkan cita-cita persatuan sebagai bangsa yang utuh dan bagaimana kemerdekaan dapat diraih. Sedangkan nasionalisme setelah proklamasi kemerdekaan tekanan nasionalisme disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi bangsa. Dengan meminjam periodisasi yang dibuat sejarawan Bernahard Dam nasionalisme mengalami pembentukan sekurang-kurangnya melalui lima tahap.

#### **Lima Tahap Pembentukan Nasionalisme Indonesia Menurut Bernahard Dam**

<b>Tahap</b>	<b>Nasionalisme Indonesia</b>	<b>Keterangan</b>
1	Nasionalisme akhir abad XIX	Tahap pembentukan yang ditandai oleh fenomena Kartini
2	Saat Politik Etis Belanda dicanangkan 1901	
3	Saat dimana benih-benih nasionalisme menampakkan pada organisasi-organisasi pribumi	Terbentuknya organisasi kebangsaan (Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia dsb.
4	Saat terjadinya konsensus gerakan-gerakan nasional sejak tahun 1920-an	Ketika muncul cita-cita kemerdekaan untuk mendirikan Indonesia merdeka
5	Proklamasi kemerdekaan 1945 dan Revolusi	Puncak perjuangan nasionalisme Indonesia tahap pertama

Pada tahap pembentukan, nasionalisme Indonesia berangkat dari pengertian yang terbatas yaitu cinta bangsa dan cinta tanah air sesuai dengan suku-suku yang sekarang ada. Dengan demikian pada tahap pertama nasionalisme agak mirip dengan *etnocentrisme* (Jong Java, Jong Karimunjawa, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatranen bond dll (sebelum 1908). Baru kemudian bergerak ke arah integrasi dan pembulatan konsep Indonesia sebagai identitas nasional.

Perkembangan selanjutnya nasionalisme dimaknai dengan *cinta bangsa dan tanah air*, mendapatkan pengertian yang lebih luas yaitu dalam skop Indonesia. Dalam semangat perjuangan melawan penjajah nasionalisme sering disebut patriotisme –heroisme (1908-1945). Pada tahap selanjutnya pengertian nasionalisme berkembang menjadi kesetiaan kepada negara bangsa (sebagai wujud dari nasionalisme) hal itu dikarenakan adanya ancaman terhadap negara kebangsaan (nasional) dari gerakan separatis dan gerakan yang bersifat ideologis. Dalam periode ini kira-kira antara (1949-1965) terjadi penurunan rasa

nasionalisme karena konflik dalam diri sesama bangsa sendiri. Selanjutnya pengertian nasionalisme dalam kurun waktu (1966-1995) juga mengalami perubahan. Dalam kurun itu dikenal dengan pembinaan kesatuan bangsa. Oleh karena itu dalam rangka menjamin eksistensi nasionalisme Indonesia peranan negara (pemerintah) cukup menonjol pada kurun itu. Hal itu selaras dengan upaya menciptakan stabilitas nasional kaitannya dengan suksesnya pembangunan nasional. Pada era reformasi (1998-sekarang) pengertian nasionalisme dikaitkan dengan adanya partisipasi segenap warga negara dalam ikut serta mengisi dan mengamankan pembangunan nasional. Suatu ungkapan dari tuntutan massa untuk ikut berperan sedemikian rupa dalam suasana yang membangun untuk mencapai cita-cita nasional dan mengejar ketinggalan di berbagai bidang.

Geertz menguraikan sejarah nasionalisme dalam empat tahap, yaitu tahap ketika gerakan-gerakan nasionalis terbentuk dan tahap gerakan-gerakan nasionalis itu terkristal, kemudian tahap gerakan-gerakan ini mengorganisasikan diri menjadi negara dan yang terakhir tahap gerakan-gerakan itu harus mendefinisikan dan menetapkan hubungannya baik dengan negara lain tempat gerakan itu muncul. Sepanjang masa tampak bahwa nasionalisme Indonesia ditempatkan sebagai strategi untuk kelangsungan hidup bangsa.

### **Nasionalisme Sebagai Strategi**

<b>No</b>	<b>Kurun Waktu</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Peran nasionalisme sebagai Strategi</b>
1	1908-1945	Melawan Penjajah Asing	Pemersatu, melawan penjajah, sikap patriotisme.
2	1945-1949	Bagaimana mempertahankan kemerdekaan	Spirit mempertahankan kemerdekaan (sikap heroisme, cinta bangsa dan tanah air)
3	1950-1965	Ancaman dari dalam baik yang bersifat ideologis maupun politis.	Spirit mempertahankan negara nasional/negara kesatuan (cinta bangsa, cinta tanah air)
4	1966-1995	Kemiskinan, Kesenjangan, Integrasi nasional	Semangat persatuan, solidaritas, partisipasi rakyat dalam pembangunan
5	1995-1998	Menurunnya kadar nasionalisme/krisis multi dimensi, korupsi, kolusi, nepotisme	Semangat perubahan/reformasi dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Semangat untuk demokratisasi.
6	1999- sekarang	Ekses reformasi: Kebebasan/ Liberalisme, individualisme/egoisme, muncul etnonasionalisme, kosmopolitanisme.	Strategi (spirit) yang cerdas (smart), partisipasi rakyat (publik) untuk melakukan pengawasan, dan berperan memberi masukan bagi kebijakan publik, dengan menghormati HAM, Hukum, Proses Demokrasi. Dimensi rasionalitas, idealitas realistik, keterbukaan.

### **Karakteristik**

Dengan kondisi masyarakat majemuk di Indonesia, maka pilihan nasionalisme Indonesia sebagai paham bersifat integral dalam arti mengatasi paham kesukuan, agama, ras

dan golongan bahkan melampaui batas-batas wilayah kesukuan. Dengan demikian nasionalisme Indonesia merupakan pilihan yang tepat karena terbuka dan memberi ruang bagi semua melampaui batas-batas dan sekat-sekat suku, agama, ras. Nasionalisme Indonesia tidak didasarkan oleh konotasi etnis, dan mengenai hal ini Franz Magnis Suseno, S.J mengatakan bahwa faham persatuan Indonesia tidak bersifat etnis melainkan etis.

Dalam kaitannya dengan karakteristik nasionalisme Indonesia, Hatta (1933) dalam Nusantarariya (1986) mengemukakan demikian:”.....akan tetapi djanganlah sekali-kali kebangsaan kita menjadi *blind* nasionalisme, ialah nasionalisme jang buta atau membuta tuli”. Dari kutipan di atas cukup jelas bahwa sifat rasional dari nasionalisme Indonesia ialah adanya sikap realistis dan keterbukaan. Sikap realistis dan keterbukaan dapat terwujud dalam sikap berani mengambil yang baik dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri, tetapi juga berani menghilangkan yang tidak baik yang ada pada diri bangsa sendiri. Selain keterbukaan sebagai ciri sifat rasional, ciri lain yaitu adanya perhitungan dan terarah pada modernisasi. Hal itu juga dapat dilihat pada pernyataan Hatta (1933) dalam Nusantarariya (1986) bawah nasionalisme yang menolak pendapat atau perbuatan dunia, adalah nasionalisme jang reaksioner.

Karakteristik nasionalisme Indonesia juga terlihat pada konsep yang dikemukakan Soekarno (1963) dalam Nusantarariya (1986) bahwa bangsa Indonesia, *natie* Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan '*le desir detre ensemble*' di atas daerah yang kecil seperti minangkabau atau Madura atau Jogja atau Bugis misalnya, melainkan bangsa Indonesia sebagai keseluruhan. Secara konsepsional nasionalisme indonesia menjadi bagian dari sistim nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu pada bagian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Oleh karena itu pemahaman mengenai nasionalisme Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sila Persatuan Indonesia dalam kaitannya dengan sila yang lain sebagai satu sistim nilai dalam Pancasila sehingga kesatuannya bersifat organis. Kesatuan yang bersifat organis yang dimaksud ialah bahwa setiap sila menjiwai dan diliputi serta dijiwai oleh sila yang lain.

Sila Persatuan Indonesia merupakan perkembangan dari prinsip Kebangsaan Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan wilayah Indonesia adalah wilayah yang satu tidak terbagi-bagi. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang disatukan oleh etnisitas seperti suku, ras, agama, darah keturunan, tetapi karena komitmen atau keinginan untuk bersatu untuk menjadi bangsa yang bebas, bersatu adil dan makmur. Begitu juga wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang terdiri dari wilayah besar dan kecil yang dihubungkan oleh selat dan laut. Bangsa Indonesia juga bersatu karena



didorong oleh adanya persamaan penderitaan (rasa senasib) karena penjajahan. Sejarah kejayaan masa silam juga memberi inspirasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Bagaimana nasionalisme Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila itu? Tentu nasionalisme Indonesia tidak boleh jatuh ke paham chauvinistik sebagaimana yang pernah terjadi di Barat (Jerman semasa Hitler). Bangsa Indonesia pernah diperingatkan oleh Soekarno agar nasionalisme tetap tumbuh dan berkembang di taman sarinya Internasionalisme. Demikian juga diingatkan agar Internasionalisme tetap berakar pada semangat nasionalisme agar tidak jatuh pada kosmopolitanisme yaitu suatu paham yang tidak menghendaki batas-batas kebangsaan. Soekarno juga mengingatkan agar nasionalisme Indonesia tidak sempit hanya terbatas pada etnis tertentu (etno nasionalisme). Artinya solidaritas kesatuan bangsa tidak hanya terbatas pada kelompok dan golongannya, melainkan harus dalam arti luas sebagai bangsa Indonesia. Nasionalisme berdasarkan Pancasila juga tidak boleh reaktif yaitu menolak hal-hal yang berbau asing walaupun yang asing itu bermanfaat untuk kebaikan bangsa. Dalam hal ini bangsa Indonesia diingatkan oleh Hatta agar nasionalisme tidak reaktif menjadi blind nasionalism. Nasionalisme Indonesia jangan sampai buta (tidak dapat melihat) apa yang tidak baik pada bangsanya sendiri. Dalam arti bangsa Indonesia harus dapat bersikap realistis agar mampu memperbaharui dan meningkatkan kehidupan bangsa dengan membuang kebiasaan yang tidak baik.

### **3. Konsep Kebijakan Publik**

#### **1. Pengertian Kebijakan**

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan

sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno , istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita

mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan- ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

## 2. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai- nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak

beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur,

karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam

masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan- ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana adalah sebagai berikut :

#### **a) Tahap penyusunan agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Menurut Suharno proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

- e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan .

## 5. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akanm dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kabijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.  
Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Stretegi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom*



*approach*, otoriter atau demokratis .

## 6. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno , ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.